

THAQĀFIYĀT

JURNAL ILMU BUDAYA

Cerahan Pemikiran Muslim Melayu di Patani
Hattand Selatan (1973-1980 M)
Usamah Bucho

Keberagaman dan Pluralisme Agama di Indonesia
Muhammad Wildan

Keberagaman dalam Pertumbuhan dan Perkembangannya
dari Masa Klasik Hingga Modern
Basrin Melamba

Keberagaman dalam dengan Kebudayaan Madura
Muh. Syamsuddin

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA

THAQAFIYYĀT Jurnal Ilmu Budaya, terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Desember, adalah media publikasi ilmiah untuk memperkaya wacana-wacana yang berkembang dalam kajian ilmu-ilmu budaya. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan menjadi media komunikasi bagi para pemerhati ilmu budaya dari berbagai perspektif. Thaqafiyat terbuka bagi para kontributor dari keahlian yang berkaitan dengan ilmu budaya..

PENYUNTING AHLI

aufiq A Dardiri
ugeng Sugiyono
faman A. Malik Sy
maharsi
abibah

PENANGGUNG JAWAB

Alwan Khoiri

PEMIMPIN REDAKSI

Ali Sodiqin

ANGGOTA REDAKSI

Ridwan
Djazim Rohmadi
Daniel Hidayatullah
Fiah Fauziyah

DISTRIBUTOR

Pujamunarta

ALAMAT REDAKSI:

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 513949
e-mail: thaqafiyat@gmail.com.

THAQAFIYYĀT

Jurnal Ilmu Budaya

Volume 11, No. 2, Juli-Desember 2010



DAFTAR ISI

Pengantar Redksi	v
Gerakan Pembebasan Muslim Melayu di Patani, Thailand Selatan (1973-1980 M)	
Usaman Bueto (hlm 173 - 190)	
Gerakan Sosial dan Peran Media: Studi Kasus Koin untuk Prita Nurdin Laugu (hlm 191 - 210)	
DIAN/Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia Muhammad Wildan (hlm 211 - 227)	
Nilai-nilai Islam dalam Karya Sastra El-Hakim Sabaruddin Garancang (hlm 229 - 243)	
Memahami Pemetaan Epistemologi Islam Muhammad 'Abid Al-Jabiry Mustari (hlm 245 - 264)	
Segi-segi Persoalan Metodologi Sejarah Aburrahman (hlm 265 - 279)	

DIAN/INTERFIDEI DAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Muhammad Wildan

*Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



ABSTRACT

Religious heterogeneity is not something new in Indonesia. History notes that the religious challenge of the local religion diversity has become a hallmark of Indonesia since its early history. However, the problems related to religious diversity came later after Christianity and Islam started to exist and flourish. Fears of the dysfunction and counter-productive movement in religions inspired some of the religious figures to establish Institut DIAN (Dialog Antar-Iman di Indonesia)/Interfidei (Institut for Inter-faith Dialogue in Indonesia) in 1992. This institution stands on the belief that all religions basically have similarities in their orientation toward the service to mankind, so that human beings can improve their quality of life for the common welfare. The term "inter-faith" was chosen to give impression that it does not only accommodate any 'faith' considered as being deserved to get the label of 'religion'. The institution started its "great project" by publishing a bibliography of the annotations of Islamic literature of the 1980s. This project just completed in 1998 under the title *Anotasi 200 Buku Islam Karya Muslim Indonesia*. The institution has more conceptual-theoretical movements diffused among Indonesian young generation. It believes that diffusing the discourse of pluralism will give more significant influence and positive effects that can last much longer than providing the problem-solving movements to the society who are facing the problem of pluralism.

Keywords: pluralisme, dialog, agama, DIAN/Interfidei, islam, kristen.

A. Pendahuluan

Pluralisme memang menjadi keharusan bagi Indonesia, sebuah bangsa yang sarat akan keanekaragaman suku, bahasa, budaya dan agama. Sebagian masyarakat menganggap keragaman sebagai sesuatu yang negatif dan menganggapnya sebagai sebuah perbedaan. Sebagian lainnya memandang secara positif, bahwa keragaman adalah sebuah kekayaan budaya. Diantara keragaman itu, agamalah yang selama ini menjadi masalah besar di Indonesia.

Semua sadar, bahwa konflik antar-agama tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi agama mereka masing-masing, selain kerugian yang berpengaruh pada disfungsi agama sebagai perekat masyarakat. Keprihatinan akan terjadinya disfungsi atau *counter-productive* pada agama inilah yang mendorong beberapa tokoh agama untuk mendirikan institut DIAN/Interfidei (Dialog Antar-Iman di Indonesia)/Institut for *Inter-faith Dialogue in Indonesia*). DIAN/Interfidei yang didirikan pada tahun 1992 sebenarnya merupakan jawaban dari trend dunia sejak tahun 1960-an tentang perlunya dialog antar berbagai pemeluk agama. Dialog inilah yang kemudian dianggap sebagai metode terkini¹ bagi para teolog atau ahli agama untuk menemukan jalan baru/alternatif yang akan mengakhiri paradigma teologis telah sekian lama stagnan dan berakhir dengan konflik agama.² Lembaga ini berdiri di atas suatu pemahaman bahwa semua agama itu pada dasarnya memiliki kesamaan orientasi berupa pelayanan kepada manusia, agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan bersama. Karena peran agama-agama di masa depan Indonesia adalah sangat besar,³ maka mereka harus bekerjasama menyatukan visi demi terciptanya suasana yang kondusif untuk menyongsong masa depan Indonesia di tengah arus demokratisasi di dunia. Tulisan ini akan berusaha meletakkan DIAN/Interfidei serta perannya dalam dalam peta pluralitas keberagamaan di Indonesia.

1. Sebenarnya peletak dasar metode ini adalah filosof Socrates. Dengan metode dialektikanya Socrates berusaha untuk menemukan kebenaran-kebenaran umum yang dideduksi dari berbagai dialog. Dialektika Socrates sangat berbeda dengan dialektikanya Hegel, yang merupakan sebuah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus.
2. Th. Sumartana, "Sejarah Singkat, Visi dan Misi Institut DIAN/Interfidei" di *Newsletter Interfidei*. Edisi Khusus 10 tahun Institut DIAN/Interfidei, 2001, hlm. 3.
3. *Newsletter Interfidei*, Edisi Perdana, April 2000, hlm. 2.

B. Sejarah Dian-Interfidei dan Kondisi Keberagamaan Indonesia

Tidak diragukan lagi bahwa setiap agama apapun mempunyai tujuan yang baik. Walaupun demikian, adalah keliru bila dikatakan bahwa semua agama itu sama dan benar.⁴ Pada dataran normatif-teologis (*das solen*) tidak ada agama yang mendorong atau menganjurkan pengikutnya untuk membuat kekacauan (*chaos*) atau kekerasan (*violence*) terhadap pemeluk agama lain.⁵ Bahkan bisa dikatakan bahwa semua agama sepakat untuk menciptakan perdamaian (*peace*). Walaupun demikian, secara historis-faktual (*das sein*) banyak peristiwa kekerasan, dan bahkan perang, dilakukan atas nama agama. Beberapa konflik antar agama di Indonesia seperti di Tasikmalaya (1996) dan Situbondo (1996) dan juga di berbagai belahan dunia seperti di India dan Irlandia cukup memberikan data seputar masalah beragama.⁶ Untuk itulah berbagai usaha harus segera diupayakan secara kontinyu untuk mengevaluasi dan memformulasikan kembali metodologi dan konsep-konsep agama, baik secara intern maupun ekstern.⁷ Usaha semacam ini penting untuk mengembalikan pemahaman keagamaan para pemeluk agama pada rel yang benar sehingga tidak mudah untuk diprovokasi di era yang sarat akan perubahan ini.

Gaung urgensi dialog antar-agama juga dirasakan oleh pemuda dan mahasiswa Indonesia. Seiring dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama berkat jasa para pemuda dan mahasiswa di tahun 1965, peran pemuda semakin eksis dan dirasakan kehadirannya di dalam kehidupan yang nyata menggantikan generasi sebelumnya yang cenderung kolot dan kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Sehingga, pada tahun-tahun itu upaya untuk mencari horizon baru yang menerobos struktur pemikiran budaya dan agama yang sudah mapan juga dilakukan oleh kaum muda.

4. Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 4.
5. M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius" dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 1.
6. Montgomery Watt menegaskan bahwa kita sekarang hidup dalam suasana yang sangat berbeda dengan ketika agama-agama Ibrahim ini diturunkan puluhan abad yang lalu. Konsep *global village*, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan "memaksa" semua agama untuk senantiasa bisa aktual dan sesuai dengan segala kemajuan ini. Lihat W. Montgomery Watt, *Religious Truth for Our Time*, (England: OneWorld Publications, 1995), hlm. 84-96.
7. *Ibid*.

Mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi baik Islam maupun Kristen sering menyelenggarakan beberapa kegiatan bersama sebagai upaya mencari titik temu antar-agama. IAIN adalah termasuk institusi yang cukup tanggap dengan tantangan pluralitas ini. Kehadiran Mukti Ali di dalam wacana keberagamaan juga menyumbangkan pemikiran yang sangat signifikan tentang pentingnya dialog antar-agama.⁸

Keprihatinan beberapa intelektual muda tentang masalah beragama juga disebabkan hubungan yang kurang harmonis antara umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen. Sejak dilarangnya komunisme pada awal pemerintahan Soeharto dan hanya 5 agama yang diperbolehkan (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuchu), banyak orang yang berpindah agama dari komunis ke Kristen. Fenomena ini juga diikuti oleh maraknya misi kristenisasi di beberapa daerah. Beberapa daerah yang merupakan kantong-kantong merah (komunis) juga menjadi pusat Islamisasi yang digerakkan oleh beberapa organisasi Islam. Hal inilah yang juga berperan dalam memperkeruh hubungan Islam dan Kristen di Indonesia yang berdasar pada saling curiga.

Sejalan dengan hal di atas, ide akan urgensi lembaga dialog antar-agama ini terus berkembang sejalan dengan pengalaman religiositas nisiatornya, Th. Sumartana. Kesempatan studi di Negeri Kincir Angin untuk menyelesaikan Doktornya tahun 1982-1991 lebih meneguhkan niatnya untuk mendirikan sebuah lembaga. Berbagai studi banding di berbagai lembaga dialog di negara Belanda dan juga diskusi dengan guru dan sahabatnya di Barat semakin memantapkan niatnya. Lebih dari itu, pertemuan dan diskusinya dengan Romo Mangunwijaya, Adnan Buyung Nasution, Parakriti an Abdurrahman Wahid semakin mendorong Sumartana untuk segera memalisasikan gagasannya. Segera setelah menyelesaikan studinya pada bulan April 1991, Th. Sumartana memulai meletakkan pokok-pokok pikirannya dalam berbagai kegiatan sambil mengupayakan legalitas lembaganya tersebut. Setelah mendapatkan pengakuan hukum sebagai sebuah lembaga pada 20 Desember 1991, Institut DIAN/Interfidei baru diresmikan pada 10 Agustus 1992. Komitmen lembaga sebagai wahana dialog antar-agama juga terlihat dari berbagai aktivis yang sejak awal berdirinya terdiri dari berbagaiemeluk agama.⁹

8. Th. Sumartana, "Sejarah Singkat...", hlm. 4.

9. Th. Sumartana, "Sejarah Singkat...", hlm. 3-5.

Walaupun tujuan lembaga ini adalah dialog antar-agama, namun Institut DIAN/Interfidei sengaja dibentuk dengan bercorak *inter-faith* (antar-iman). Dipilihnya term yang lebih umum ini agar lembaga tidak terkesan hanya mengkomodasikan berbagai keyakinan yang saat itu "layak" mendapatkan "label" agama. Dengan istilah yang lebih umum ini diharapkan lembaga ini bisa diterima lebih luas oleh berbagai orang yang mempunyai iman (keyakinan), tanpa melihat apakah itu agama atau "hanya sekedar" keyakinan. Pada prinsipnya, inisiator lembaga ini mempunyai keyakinan bahwa esensi agama adalah iman, sehingga dialog antar-iman bisa menembus batas-batas istilah agama yang umumnya dipahami oleh banyak orang.¹⁰

Dengan dibantu oleh beberapa aktivis dari Yogyakarta, lembaga ini memulai memijakkan berbagai kegiatannya. Bersama dengan aktivis generasi pertama lembaga ini seperti Elga Sarapung, Ciciek Farcha, Farid Wajidi dan Hajar Dewantara, Institut DIAN/Interfidei memulai "proyek besar"-nya dengan menerbitkan bibliografi beranotasi literatur Islam dasawarsa 1980-an. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal memaksa pekerjaan ini terhambat hingga baru terselesaikan dan diterbitkan oleh generasi kedua lembaga ini pada 1998 dengan judul *Anotasi 200 Buku Islam Karya Muslim Indonesia*.

Di samping itu, berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, dan lokakarya juga dilakukan sebagai upaya untuk "pembentukan" jati diri Institut DIAN/Interfidei. Keseriusan para aktivisnya menjadikan lembaga ini berkembang dengan pesat dan diterima dengan baik oleh banyak kalangan masyarakat.¹¹ Sejalan dengan perubahan zaman, DIAN/Interfidei menjadi lebih matang sebagai sebuah lembaga sosial yang dibarengi dengan perubahan pada kepengurusan dan aktivisnya. Terpilihnya Eka Darmaputra, sebagai ketua Yayasan DIAN/Interfidei, Djohan Effendi dan Daniel Dhakidae, sebagai wakilnya, serta Th. Sumartana sebagai sekretaris semakin menyiratkan eksistensi lembaga ini di masyarakat.¹²

10. *Ibid.*, hlm. 4-5.

11. Wawancara dengan Elga Sarapung pada 16 Mei 2002

12. Keberadaan dan kehidupan lembaga ini juga tidak luput dari dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak diantaranya adalah Pdt. Jaspert Slob dari gereja Hervormd dan beberapa rekan gereja Gereformeerd di Belanda. Kehadiran beberapa aktivis generasi kedua seperti Hairus Salim, Ahmad Suaedy, Zuli Q. dir dll. juga tidak layak dilupakan dalam perkembangan DIAN/Interfidei. Lihat Th. Sumartana, "Sejarah Singkat...", hlm. 5.

Selain berbagai seminar dan lokakarya yang bertujuan menebarkan ide pluralisme di berbagai level, DIAN/Interfidei juga mulai kegiatannya pada level *action*, yaitu dengan terlibat pada berbagai upaya perdamaian dengan lembaga lain di daerah-daerah yang konflik. Tak kurang dari kota-kota seperti Maluku, Mataram, Makassar, Manado, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Bengkulu, Kupang, Ende, Jayapura juga mendapatkan perhatian lembaga ini. Kegiatan di berbagai daerah pada paruh kedua tahun 1990-an ini banyak "mendewasakan" DIAN/Interfidei sehingga lebih meneguhkan tantangan pluralitas yang betul-betul nyata di tengah modernisasi dan demokratisasi Indonesia.

Independensi dan keterbukaan merupakan prinsip utama institut DIAN/ Interfidei yang senantiasa dipupuk dan dikembangkan.¹³ Prinsip pertama ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga ini, terutama ketika berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah Orde Baru yang cenderung represif dan curiga terhadap berbagai aktivitas keberagamaan selalu menjadi hambatan (baca: tantangan) bagi DIAN/Interfidei dalam berbagai aktivitasnya. Prinsip independensi menjadikan lembaga ini hampir tidak pernah berhubungan secara dialogis dengan pemerintah, kecuali sebatas aturan-aturan formal yang memang harus dipenuhi oleh lembaga. Tidaklah mengherankan jika baru pada masa transisi, yaitu tahun 1998, Menteri Agama Prof. Dr. Malik Fadjar merasa perlu datang ke kantor institut DIAN / Interfidei untuk berdialog dengan pengurus lembaga ini. Bagi DIAN / Interfidei, kedatangan Menteri Agama ini merupakan penghormatan tersendiri bagi lembaga karena keberadaannya diperhitungkan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Lebih-lebih ketika Menteri Agama itu juga "menyumbangkan" ide-idenya bagi perkembangan institut di masa mendatang.¹⁴

Institut DIAN/ Interfidei selalu membuka diri pada level praksis atau formal, level normatif, dan level empiris. Ini berarti DIAN/Interfidei sangat menghormati berbagai ide, saran, usulan dan kritik yang konstruktif demi kemajuan lembaga ini. Masukan tidak hanya dari praktisi atau akademisi di bidang agama, tetapi juga dari budayawan, politisi, ekonom dan bahkan ahli lingkungan hidup.¹⁵ Tokoh-tokoh seperti Umar Kayam (budayawan), Faisal Basri (ekonom), M. Amin Rais (politisi), Sarwono Kusumaatmaja

(Menteri Lingkungan Hidup) dan banyak lagi lainnya pernah dihadirkan untuk memberikan sumbangan pemikiran pada institut ini.

C. Paradigma Pluralisme Agama Institut Dian-Interfidei

Institut DIAN/Interfidei memposisikan diri sebagai broker atau penengah bagi terjalannya komunikasi antar berbagai penganut agama. Forum ini bertujuan mencari titik temu antara berbagai keyakinan/iman sehingga pada gilirannya nanti agama bisa berperan secara utuh dalam berbagai persoalan kemanusiaan.¹⁶ Keterbukaan (inklufitas) menjadi kata kunci dalam forum dialog ini sehingga meniadakan kecurigaan terhadap agama/iman lain. Tahap selanjutnya, secara bersama-sama agama-agama itu merumuskan sejauhmana perhatian mereka terhadap berbagai aspek kehidupan sekaligus memberikan jawaban alternatif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada. Dengan demikian agama akan senantiasa terlibat dalam secara aktif dalam pembangunan dan bukan sebagai penghambat sebagaimana diyakini oleh beberapa pihak.

Pluralisme di Indonesia sejak awal memang disadari sepenuhnya oleh para *founding-fathers* negara ini dengan dicetuskannya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Institut DIAN/Interfidei menilai bahwa semboyan itu memerlukan tafsiran yang kreatif, yaitu bahwa semboyan itu menjamin keragaman dan juga interaksi yang kritis dan positif demi kepentingan bersama. Interaksi yang terbuka dan saling menghormati antar-agama bisa diwujudkan dengan dialog dan kerjasama sebagai perwujudan dari pluralisme. Dengan demikian, dialog antar-agama merupakan salah satu upaya untuk mencari model bagi hubungan sosial-keagamaan yang mendukung proses emansipasi dan demokrasi di semua level kehidupan.¹⁷

Selama ini pluralisme yang dipahami oleh umat beragama hanyalah sebatas toleransi, yaitu pengakuan keberadaan agama atau kepercayaan lain, dan belum benar-benar sebagaimana konsep ideal pluralisme. Padahal toleransi hanyalah salah satu prinsip dalam konsep pluralisme dan belum menuju pada dialog yang terbuka. Keterbatasan pemahaman seperti ini oleh Haryatmoko disebut dengan pluralisme *de facto*. Pemahaman pluralisme ini masih rentan akan gesekan karena paradigma ini hanya sekedar menunda

13. *Newsletter Interfidei*, Edisi Kedua, Agustus 2000, hlm. 3.

14. *Newsletter Interfidei*, No. 2, Agustus 1998, hlm. 8.

15. *Newsletter Interfidei*, No. 1, April 1998, hlm. 3.

16. *Ibid*, hlm. 8.

17. *Ibid*, hlm. 8.

kompetisi superioritas antar-agama dan jauh dari inklusivisasi identitas.¹⁸ Oleh karena itu, paradigma pluralisme perlu diubah menjadi pluralisme *de jure* sebagaimana yang akan dibahas pada bagian lain tulisan ini.

Ringkasnya, institut DIAN/Interfidei berpendapat bahwa iman merupakan esensi atau *core* dari agama. Agama, baik yang sawawi atau non-sawawi, secara universal mempunyai tujuan yang baik, yaitu mencapai kesejahteraan sosial. Adalah tidak mungkin bagi seluruh manusia di dunia ini untuk memeluk/meyakini satu agama. Kesadaran akan hal itu mestinya mendorong umat beragama untuk selalu mencari titik temu untuk kerja bersama mewujudkan hal-hal yang jauh lebih urgen dalam kehidupan di dunia ini. Dialog adalah sebuah jalan damai nir-kekerasan dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan.¹⁹ DIAN/Interfidei mengajak masyarakat menyikapi perbedaan yang ada secara positif dan bahkan menganggap perbedaan itu sebagai kelebihan/keutamaan untuk menambahkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan bersama.²⁰

Walaupun demikian, DIAN/Interfidei tidak berkecimpung pada wilayah praksis, tapi lebih pada level normatif. Ini berarti bahwa lembaga ini tidak akan terlibat dalam mendamaikan dua kelompok umat beragama yang sedang berselisih atau berbeda pendapat. Gerakan DIAN/Interfidei lebih bersifat konseptual-teoritik yang disembarkan pada generasi muda Indonesia. Lembaga ini yakin bahwa menyebarkan wacana pluralisme akan mempunyai 'gating dan efek positif yang jauh lebih luas dan lebih lama (*long-lasting*) daripada memberikan *problem-solving* pada masyarakat yang sedang menghadapi *problem* pluralisme. Oleh karena itu, kegiatan kegiatan lembaga ini juga lebih dikhususkan untuk kalangan tertentu yang diharapkan bisa menerima konsep-konsep pluralisme, yaitu generasi muda khususnya kalangan akademik dan praktisi.

D. Peran Institut Dian-Interfidei dalam Pluralisme Indonesia

Selama 10 tahun lebih institut DIAN/Interfidei telah berkecimpung dalam urusan antar-iman ini dan banyak hal yang telah dilakukannya. Berbagai

usaha dilakukan oleh lembaga ini untuk menebar "virus" pluralisme, yaitu dengan menyebarkan masyarakat perlunya dialog antar para pemeluk agama. Dengan berbagai kegiatannya, institut DIAN/Interfidei mencoba untuk menerjemahkan ide pluralisme yang masih sangat elitis ini sehingga bisa dipahami lebih mudah oleh masyarakat luas. Diskusi, seminar dan publikasi diselenggarakan untuk mensosialisasikan gagasan tentang agama dan masyarakat menjadi wacana yang produktif, kreatif dan konstruktif.²¹ Dengan menanamkan "virus" inklusivisme dan pluralisme pada masyarakat luas, akan terwujud bangsa yang berperadaban dan demokratis.

Kegiatan yang dilaksanakan institut DIAN/Interfidei antara lain adalah diskusi bulanan. Diskusi ini dilakukan di kantor DIAN/Interfidei dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya aktivis-aktivis atau berbagai LSM yang konsen terhadap pluralisme. Sejak tahun 1996 diskusi ini tidak bulanan, tapi triwulanan. Walaupun demikian, pada rentang tahun 1996-1997 DIAN/Interfidei bekerjasama dengan KOMPAS menyelenggarakan 12 kali diskusi bulanan yang dinamakan Forum Wacana Muda. Dengan diskusi-diskusi ini selain bisa menyebar-luaskan ide-ide dialogis seputar agama, DIAN/Interfidei juga berkepentingan terhadap ide-ide yang secara kontinyu dielaborasi sehingga memperkaya lembaga ini akan tema-tema seputar dialog antar-iman.

Kegiatan lain adalah forum komunikasi yang lebih umum dan terbuka, yaitu seminar dan penerbitan. Seminar dan lokakarya/workshop yang pernah diselenggarakan sudah tak terhitung lagi, termasuk beberapa diantaranya bertaraf internasional. Penerbitan yang diyakini akan lebih luas bisa menjangkau masyarakat diwujudkan dalam dua bentuk, buku dan newsletter. Sejauh ini DIAN/Interfidei telah menerbitkan 22 buku dan ada 6 buku lagi yang siap naik cetak. *Newsletter Interfidei*, buletin catur-wulanan yang dianggap cukup efektif untuk komunikasi antara berbagai lembaga sudah terbit sebanyak 10 kali termasuk edisi khusus 10 tahun institut DIAN/Interfidei. Kegiatan lain DIAN/Interfidei yang cukup signifikan adalah penelitian. Berbagai penelitian seputar hubungan antar-agama dilakukan di berbagai kota di Indonesia, termasuk kerusuhan sosial yang terjadi di Situbondo pada tahun 1996.²²

21. Elga sarapung, "Narasi Kegiatan 10 tahun Institut Dialog Antar-lman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei)" dalam di *Newsletter Interfidei*, Edisi Khusus 10 tahun Institut DIAN/Interfidei, 2001, hlm. 37.

22. *Newsletter Interfidei*, Edisi Khusus, 2001, hlm. 41.

18. Haryatmoko, "Paradigma Hubungan antar Agama: Pluralisme de jure dan Kritik Ideologi" dalam M. Amin Abdullah dkk. *Antologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 34.

19. *Newsletter Interfidei*, Edisi Perdana, April 2000, hlm. 2, fold. bidl. 21

20. *Ibid.*, hlm. 4. 8. fold. bidl. 21

Kehadiran institut DIAN/Interfidei dengan berbagai kegiatannya begitu nyata bagi banyak pihak dan memberikan pengaruh yang positif. Kegiatan-kegiatan DIAN/Interfidei di Yogyakarta maupun di propinsi lain menyadarkan banyak pihak, terutama kalangan muda, akan urgensi adanya forum antar umat beragama. Pada tahun 1996, beberapa tokoh agama di Yogyakarta menyadari akan perlunya sebuah forum dialog menyusul berbagai ketegangan dan konflik sosial di beberapa wilayah di Indonesia. Pada tahun berikutnya, 1997, beberapa tokoh agama yang punya basis di masyarakat mendirikan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB). Institut DIAN/Interfidei ikut memfasilitasi keberadaan forum itu dan mendampinginya dalam berbagai kegiatannya.²³ Deklarasi *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang merupakan *underbow* dari *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) juga tidak bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan institut DIAN/Interfidei. Salah satu kunci keberhasilan pluralisme agama justru dengan beragama yang baik, dan bukan justru meninggalkan agama. Kesadaran akan perlunya melihat ke dalam (*inward-looking*) ajaran agama masing-masing inilah yang mengilhami munculnya Yogya Gandhi Vidyapith Asram pada tahun 1998. Lembaga yang diasuh oleh Ibu Gedong Bagus Oka ini secara khusus menekankan pada studi ajaran-ajaran Mahatma Gandhi.²⁴ Di Sulawesi Selatan, sebuah forum bernama Forum Dialog Antar-Kita, dibentuk sebagai tindak lanjut dari semiloka institut DIAN/Interfidei di daerah itu.²⁵ Sejalan dengan itu, sejak tahun 2007 pemerintah juga mendirikan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) baik ditingkat nasional maupun regional. Dengan lembaga itu diharapkan ketegangan antara umat beragama lebih bisa diminimalisir.

Misi pluralisme di Indonesia adalah beban yang sangat berat bila harus diemban oleh institut DIAN/Interfidei sendiri. Untuk itulah DIAN/Interfidei menggandeng banyak partner untuk bersama-sama memikul tanggung-jawab ini baik dari lembaga-lembaga berskala regional, nasional maupun internasional. Tak kurang dari lembaga-lembaga seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), LKPSM-NU, Community Development Bethesda (CD Bethesda), World Conference on Religion and Peace (WCRP), Interchurch

23. *Newsletter Interfidei*, No. 2, Agustus 1998, hlm. 2-4.

24. *Newsletter Interfidei*, Edisi Perdana, April 2000, hlm. 7.

25. *Newsletter Interfidei*, Edisi Kedua, Agustus 2000, hlm. 11.

Organization for development Co-operation (ICCO), British Council, INFID, Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity pernah bekerjasama dengan DIAN/Interfidei.

Sejalan dengan idealismenya, mulai tahun 2000 institut DIAN/Interfidei telah merencanakan untuk membangun sebuah "Pusat Dialog". Dengan *Dialogue Center* ini diharapkan kegiatan-kegiatan dialogis antar-agama bisa segera ditingkatkan sejalan dengan peran agama untuk mendukung pembangunan nasional.²⁶

E. Hambatan Pluralisme di Indonesia

Reformasi pada tahun 1998 telah meretas jalan baru dan benar baru bagi penduduk Indonesia. Kata "reformasi" menjadi kata yang sangat ampuh untuk melegalkan semua tindakan dan mencairkan segala kebekuan yang selama ini terjadi. Bahkan reformasi telah dianggap sebagai "penyelamat" atau mungkin semacam Ratu Adil untuk mencapai kebebasan dalam hidup. Akhirnya, banyak muncul demonstrasi di berbagai level sosial baik di kota maupun desa yang mengatasnamakan reformasi. Ironisnya, banyak di antara demonstrasi itu berakhir dengan kerusuhan sosial. Sekilas terlihat bahwa eforia reformasi menuju demokrasi telah "kebablasan" dan jauh dari yang diharapkan.

Dengan lapang dada dan hati terbuka, masyarakat Indonesia harus introspeksi terhadap berbagai kerusuhan sosial bernuansa agama yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya, kerusuhan itu terjadi karena adanya sekelompok pemeluk agama tidak rela dengan adanya keragaman/pluralitas dalam beragama. Sudah sewajarnya bila umat beragama sadar bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan (baca: *summatullah*); pluralitas sudah biasa terjadi dan akan terus berlangsung, termasuk pluralitas dalam suatu agama, pluralitas internal.²⁷ Syamsu Rizal Panggabean melihat bahwa masalah agama bukanlah selalu menjadi problem utama pada beberapa kerusuhan bernuansa agama; agama selalu menjadi sentimen terakhir untuk melegalkan tindakan mereka atau bahkan sebagai trigger (pemicu) kerusuhan-kerusuhan sosial di Indonesia. Itulah sebabnya walaupun banyak masalah sosial dan politik yang melandasi suatu tindakan brutal, agama

26. *Newsletter Interfidei*, Edisi Perdana, April 2000, hlm. 2-3.

27. Kuntowijoyo, *Muslim tanpa Masjid*. (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 289.

selalu menjadi sentimen yang sangat sensitif untuk di *blow up*.²⁸

Peran pemerintah sangat besar dalam upaya menciptakan iklim perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu, pluralisme yang sekarang masih sangat elitis (barang mewah) perlu lebih disosialisasikan di masyarakat akar rumput dengan berbagai jalan, diantaranya adalah lewat pendidikan. Akhir-akhir ini banyak orang mengkritisi kondisi pendidikan di Indonesia yang berhasil menjadikan orang pandai tapi gagal membuat orang untuk mencintai sesama. Pendidikan hanya berorientasi pada pengembangan pengetahuan kognitif dan mengabaikan aspek spiritual.²⁹

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, juga mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia sudah berhasil menjadikan masyarakat pandai, tapi gagal menanamkan nilai-nilai moral. Banyak orang mengaku beragama tapi berperilaku tidak agamis, seperti korupsi dan kerusuhan misalnya.³⁰ Sudah saatnya tema pluralisme masuk dalam sistem pendidikan di Indonesia yang tidak hanya dibicarakan dalam mata pelajaran agama, tapi menjadi semangat berbagai pelajaran sekolah. Dengan begitu maka pluralisme tidak lagi konsep elitis yang dibicarakan di ruang-ruang seminar dan hanya dikonsumsi oleh akademisi atau agamawan.

Pendidikan agama yang ada belum memadai sebagai mata pelajaran yang mengajarkan moral bagi peserta didik. Kalau kita lihat lebih mendalam, kesalahan utama adalah pada sistem pembelajaran agamanya. Kebanyakan semua pelajaran diajarkan dengan metode yang sama. Merujuk pada tujuan pendidikan kontemporer (Taxonomi Bloom), tujuan pendidikan dibagi dalam tiga ranah: kognitif, afektif dan psikomotorik. Sekolah dan juga perguruan tinggi sudah seharusnya membedakan metode pengajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Agama sejauh ini dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi lebih menekankan pada aspek kognitif dan belum banyak yang mengajarkan pada ranah afektif. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia yang belum cukup komprehensif sering sulit untuk terwujudnya masyarakat yang toleran, bahkan kadang-kadang berakhir dengan kerusuhan. Toleransi agama tidak bisa hanya sekedar diinstruksikan oleh pemerintah atau negara, tapi melalui jalur yang tepat diantaranya adalah

28. Syamsu Rizal Panggabean, "Peran Kelompok Antariman dalam Resolusi Konflik", 2000.

29. *Newsletter Interfidei*, Edisi Perdana, April 2000, hal. 8.

30. *Kompas*, 23 April 2002, hlm. 9.

pendidikan.³¹ Masyarakat yang stabil dan dewasa secara mental inilah yang menjadi prasyarat Indonesia untuk tinggal landas.

Masalah yang cukup signifikan dalam pluralisme agama di Indonesia adalah adanya kecurangan antar umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen. Konflik atau perseteruan antara dua agama Ibrahim ini merupakan sejarah lama yang berkepanjangan. Di Indonesia, perseteruan ini semakin akut oleh isu seputar Kristenisasi. Penelitian Departemen Agama tahun 1991 di Klaten, Jawa Tengah menengarai bahwa isu Kristenisasi merusak hubungan baik antar umat beragama. Kristenisasi yang agresif yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis Kristen inilah yang menjadikan umat Islam merasa terganggu.³²

Untuk itu sudah sepatutnya berbagai agama di Indonesia difasilitasi oleh pemerintah mengembangkan kode etik penyebaran agama sehingga tidak ada kecurangan antar umat beragama.³³ Walaupun pada tahun 1967 pemerintah telah gagal untuk memfasilitasi kedua agama ini untuk berdialog berkenaan dengan prinsip-prinsip penyebaran agama,³⁴ tapi semua pihak seharusnya sadar bahwa kepentingan bersama (kesejahteraan sosial) lebih utama daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu (kuantitas pemeluk agama). Fakta membuktikan bahwa, kecurangan ini akhirnya bisa berbuntut pada kerusuhan sosial. Sudah saatnya umat beragama di Indonesia saling menghormati dan tidak saling merebut umat beragama dengan dalih apapun. Masing-masing umat beragama harus lebih mendalami agama (baca: teologi) mereka masing-masing secara komprehensif, sehingga masing-masing menghormati warisan budaya agama lain secara serius.³⁵

Secara konseptual, pluralisme juga menjadi masalah yang cukup signifikan di Indonesia. Saat ini, masih banyak kalangan Islam garis keras

31. Olaf Schuman, "Religious Tolerance: Between Myth and Reality", Makalah dipresentasikan dalam *International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia* di Leiden 26-27 November 1997.

32. Th. Sumartana, "SARA: An Unfinished Process of National Integration", Makalah dipresentasikan dalam *International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia* di Leiden 26-27 November 1997, 6-7.

33. *Ibid*.

34. Ahmad Sueady (et al), *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, (Yogyakarta: DIANI/Interfidei, 1993), hlm. x-xi.

35. Karel Stenbrink, "Danger and Dreams of World Religions", Makalah dipresentasikan dalam *International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia* di Leiden, 26-27 November 1997, hlm. 8.

yang tidak setuju dengan konsep pluralisme. Mereka memahami bahwa pluralisme berarti semua agama itu sama, atau beragama apapun itu sama, bukan pada arti keragaman beragama. Walaupun tidak sedikit para pluralist atau akademisi yang berpendapat demikian, konsep ini cenderung membuat umat beragama resah. Lebih dari itu, pendapat ini cenderung membahayakan keragaman umat beragama di Indonesia karena resistensi terhadap konsep ini akan menimbulkan eksklusivisme di kalangan umat beragama di Indonesia.

Oleh karena itu, kehadiran institusi semacam DIAN/Interfidei seharusnya dipandang oleh berbagai kalangan umat beragama secara positif. Misi pluralisme harus diemban dan menjadi tanggungjawab berbagai pihak, terutama tokoh-tokoh agama (agamawan). Para agamawan mempunyai peran kunci dalam memberikan pemahaman agama yang inklusif.³⁶ Berangkat dari inklusivitas inilah diharapkan dapat mengurangi sensitivitas antar agama. Selain itu, untuk mereduksi rasa curiga terhadap agama lain, perlu dibangun rasa saling mengetahui dan memahami agama lain. Ketidaktahuan seseorang akan suatu agama akan menimbulkan rasa curiga, dan bahkan menyebabkan eksklusivisme yang berlebihan. Akhirnya, seseorang tersebut akan menganggap bahwa hanya agamanya sendirilah yang mengajarkan kebaikan dan agama lain tidak.

F. Penutup

Pluralisme adalah prasyarat utama menuju kehidupan yang demokratis. Kehidupan beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai demokratis pada gilirannya nanti akan menyumbangkan tegaknya demokrasi di Indonesia. Di sinilah institut DIAN/Interfidei bisa mengaktualisasikan dirinya, mendorong umat beragama untuk memahami baik pluralisme internal maupun eksternal. Secara faktual, DIAN/Interfidei adalah lembaga yang sangat inklusif yang selalu terbuka untuk menerima ide-ide pluralisme dari berbagai pihak.

Di samping itu, seyogyanya DIAN/Interfidei menyadari adanya beberapa potensi konflik dalam menyebarkan ide pluralisme ini. Untuk itulah agar institut ini tidak terjebak pada pluralisme *de facto* sebagaimana di

masa Orde Baru, DIAN/Interfidei harus mengembangkan konsep pluralisme *de jure*. Pluralisme *de facto* adalah cara pandang agama yang inklusif dalam arti tidak menghargai kekhasan dan nilai-nilai agama lain. Pluralisme semacam ini masih rentan terhadap ketegangan dan konflik, karena ini tidak memecahkan esensi masalah tapi sekedar menanggukkan suatu bentuk kompetisi dalam masalah superioritas agama.[]

36. Pernyataan Th. Sumartana dalam diskusi *Educating Pluralism* di Hotel Radisson pada bulan Mei 2002 yang diadakan oleh FkBA bekerjasama dengan British Council.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dkk, *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Engineer, Asghar Ali, "Islam and the Doctrines of Peace and Non-Violence" dalam *Islam and Modern Age*, Februari 2001.
- Haryatmoko, "Paradigma Hubungan Antar Agama: Pluralisme de Jure dan Kritik Ideologi", dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Hefner, Robert W., "Islamization and Democratization in Indonesia", pada Robert W. Hefner and Patricia Horvath (eds.), *Islam in an Era of Nation State*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Kompas*, 23 April 2002.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- Newsletter Interfidei*, Edisi Kedua, Agustus 2000.
- Newsletter Interfidei*, Edisi Perdana, April 2000.
- Newsletter Interfidei*, No. 1, April 1998.
- Newsletter Interfidei*, No. 2, Agustus 1998.
- Newsletter Interfidei*. Edisi Khusus 10 tahun Institut DIAN/Interfidei, 2001.
- Panggabean, Syamsu Rizal, "Peran Kelompok Antariman dalam Resolusi Konflik", 2000.
- Schuman, Olaf, "Religious Tolerance: Between Myth and Reality", Makalah dipresentasikan dalam *International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia* di Leiden 26-27 November 1997.
- Stenbrink, Karel, "Danger and Dreams of World Religions", Makalah dipresentasikan dalam *International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia* di Leiden 26-27 November 1997.
- Sueady, Ahmad, (et al), *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 1993.
- Sumartana, Th. "SARA: An Unfinished Process of National Integration", Makalah dipresentasikan dalam *International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia* di Leiden 26-27 November 1997.
- Sunardi, St., "Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung bagi Dialog antar agama", dalam Ahmad Sueady, Ahmad, (et al), *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 1993.
- Watt, W. Montgomery, *Religious Truth for Our Time*, England: OneWorld Publications, 1995.